

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

111

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
---	---

KODE: LISTRIK GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MIGAS UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 14 TAHUN 2004

"Potret Buruk Pertambangan Indonesia"

Siti Maimunah dengan nada suara tegas menuntut pemerintah agar mewajibkan PT Newmont Minahasa Raya mereklamasi lokasi penambangan selama 30 tahun. Bukan tiga tahun seperti yang dicantumkan dalam dokumen penutupan perusahaan pertambangan terbesar setelah PT Freeport Indonesia itu.

Apa alasan selama 30 tahun lamanya? Siti berujar, secara akal sehat tiga tahun adalah jangka waktu yang terlalu singkat untuk lokasi penambangan yang dikelola Newmont. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang ini berpatokan pada kasus-kasus lingkungan sebelumnya.

Sepengertahuannya Indonesia pun belum memiliki aturan yang memuat aturan tentang jangka waktu reklamasi perusahaan pertambangan yang akan mengakhiri kontrak kerjanya. Kasus pencemaran logam berat di Teluk Buyat—tetapi dibantah oleh Newmont—menurut Siti, adalah bukti pengelolaan sektor tambang yang buruk di negeri ini selama ini. "Newmont, potret situasi pertambangan di Indonesia," ujarnya kemarin.

Selain itu, komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan masih belum memuaskan. Siti menunjuk pada kasus pembuatan rancangan keputusan presiden yang digodok sejak 2001, tetapi sampai sekarang belum ada wujudnya. Padahal, keputusan presiden itu berbicara tentang pemulihan lingkungan di areal pertambangan.

Dalam rancangan keputusan yang tak kunjung terbit, kata Siti, ada aturan yang justru meminggirkan kepentingan masyarakat dan lingkungan. "Di situ misalnya mengatakan, pemulihan lingkungan tergantung pada kondisi keuangan perusahaan," ujarnya. ● maria rita

28